BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil wawacara terkait implementasi kebijakan pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelayanan pensiun PNS pada BKPDSM Kab. Barru dengan memanfaatkan fasilitas *google form*. Proses ini dibagi dalam 4 tahap yaitu: 1) PNS mengisi data dan mengunggah dokumen pada *google form*, 2) BKPSDM Kab. Barru memverifikasi dokumen, dan meremajakan data pada SIASN, 3) BKPSDM Kab. Barru memasukkan dokumen dan mengirim usul melalui SIASN, dan 4) BKPSDM Kab. Barru mencetak dan Menyerahkan SK Pensiun. Selain proses yang berlangsung di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, terdapat tahapan penetapan pertimbangan teknis pensiun yang ditetapkan di BKN/Kanreg IV BKN Makassar, yang dijadikan dasar penetapan SK Pensiun PNS;
2. Untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru digunakan model Van Horn dan Van Meter. Ada enam indikator yang digunakan, yaitu:
   a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Ukuran dasar telah ditetapkan dengan adanya SOP dalam rangka mencapai tujuan penetapan SK Pensiun yang tepat waktu;

b. Sumber-sumber. Sumber daya manusia pengelola layanan pensiun tersedia dengan jumlah 3 orang dan akan mendapatkan penambahan CPNS. Kebijakan ini juga mendapatkan sumber anggaran yang cukup;
c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Komunikasi internal BKPSDM Kab. Barru antara atasan dengan bawahan berjalan dengan baik. Komunikasi antara BKPSDM Kab. Barru dengan pihak perangkat daerah/unit kerja dan BKN/Kanreg IV BKN Makassar berjalan dengan baik. Hambatan yang terjadi dalam komunikasi ini, disebabkan kemampuan pengelola kepegawaian pada perangkat daerah/unit kerja dalam menerima pesan dan informasi dari BKPSDM Kab. Barru;
d. Karakteristik dari badan pelaksana. Pengelola layanan, sudah kompeten dalam memahami tujuan dan standar layanan serta kompeten dalam menjalankan aplikasi *google form* dan SIASN BKN. Pengawasan atasan sudah berjalan dengan baik, bahkan dalam aplikasi SIASN disiapkan fitur approval atasan untuk memeriksa dan menyetujui usul pensiun ke BKN/Kanreg IV BKN Makassar;
e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politiik. Secara politik, Bupati Barru mendukung proses layanan yang berjalan dan mendukung pemberian hak-hak kepegawaian. Terdapat kondisi sosial organisasi yang menghambat layanan pensiun, pengelola kepegawaian pada unit kerja sulit mengumpulkan dokumen

untuk disampaikan ke BKPSDM Kab. Barru, hal tersebut disebabkan karena PNS kurang disiplin dan susah dihubungi;

f. Kecenderungan pelaksana. Respon pelaksana layanan, yaitu menyetujui layanan melalui *google form* dan melaksanakan layanan sesuai SOP yang ditetapkan secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Instrumen yang dapat digunakan dalam proses pengambilan kebijakan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pelayanan pensiun PNS pada BKPSDM Kab. Barru, yaitu dengan membuat *policy brief*. Yang berisikan rekomendasi kebijakan, yaitu:
   a. BKPSDM Kab. Barru perlu memetakan PNS yang terlambat memasukkan dokumen usul pensiun. Bila ditemukan PNS yang belum memasukkan dokumen tiga bulan sebelum memasuki batas usia pensiun, maka BKPSDM Kab. Barru perlu mendatangi unit kerja yang bersangkutan. Melakukan pendampingan khusus dalam mengumpulkan dokumen usul pensiun PNS;
   b. Pencetakan surat keputusan pensiun dan penandatanganan secara elektronik melalui aplikasi SIASN;
   c. Melaksanakan coaching pengusulan pensiun PNS pada UPT Sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Barru. Peserta coaching merupakan ASN yang bertugas sebagai admin e-office tiap sekolah.

2. Harapan-harapan impelementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan diterangkan atau disampaikan, dan oleh keakuratan dan stabilitas dalam menyampaikan tujuan kebijakan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. BKPSDM Kab. Barru perlu meningkatkan komunikasi dengan dengan unit kerja yang besar seperi Dinas pendidikan dan Dinas Kesehatan;
3. Menempatkan pegawai negeri sipil yang kompeten dalam jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan SDM pada perangkat daerah. BKPSDM Kab. Barru akan sangat terbantukan bila jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang kompeten. Penempatan bukan karena pertimbangan senioritas atau kedekatan. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, diperlukan pengelola kepegawaian yang paham teknologi informasi.

C. Produk Tesis

Bentuk produk tesis yang dibuat adalah *policy brief,* yang mana merupakan hasil rekomendasi analisis implementasi kebijakan dengan menggunakan model Van Horn dan Van Meter. Diharapkan dapat meyakinkan *policy maker* agar mengadopsi alternatif pilihan yang diusulkan. Judul *policy brief* yaitu: “Akselerasi Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barru”.